

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Barat serta analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan beras dan non-beras oleh Perum BULOG Kanwil Sumatera Barat sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang secara tegas mengatur tanggung jawab BULOG dalam pengadaan dan penyaluran komoditas pangan pokok. Proses pengadaan ini secara prinsip diutamakan berasal dari produksi dalam negeri, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, dengan tetap memperhatikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Namun, dalam kondisi tertentu seperti produksi yang tidak mencukupi atau krisis ketersediaan, pemerintah memberikan ruang bagi pelaksanaan pengadaan melalui impor sebagai alternatif kebijakan.
2. Perum BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya di sektor pangan, BULOG

juga berkoordinasi langsung dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai otoritas kebijakan pangan di tingkat nasional. Dalam kerangka tersebut, Perum BULOG memiliki tanggung jawab strategis yang sangat signifikan dalam menjamin stabilitas pasokan serta pengendalian harga komoditas pangan pokok di masyarakat, khususnya melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), baik dalam kondisi normal, saat terjadi lonjakan harga, maupun dalam keadaan darurat.

3. Produk pangan yang dikelola dan disalurkan oleh Perum BULOG Kanwil Sumatera Barat mencakup dua kategori utama, yaitu beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan beras komersial. Beras CPP digunakan untuk berbagai program prioritas pemerintah seperti bantuan pangan bagi masyarakat miskin, operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, serta bantuan dalam situasi bencana alam atau kedaruratan pangan. Sementara itu, beras komersial dipasarkan melalui jaringan retail dan kerja sama dengan berbagai lembaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Di luar komoditas beras, Perum BULOG juga turut mengelola dan menyalurkan komoditas non-beras seperti gula kristal putih, minyak goreng kemasan, tepung terigu, dan jagung pakan, baik melalui program pemerintah maupun distribusi komersial, sebagai upaya diversifikasi logistik pangan nasional.
4. Dalam pelaksanaan pengadaan di lapangan, terdapat sejumlah kendala yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius, antara lain dominasi hasil panen beras varietas premium di wilayah Sumatera Barat yang tidak sesuai

dengan spesifikasi beras medium sebagaimana ketentuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Selain itu, kondisi geografis dan iklim setempat yang tidak mendukung terjadinya musim panen raya secara serempak mengakibatkan harga gabah dan beras cenderung tinggi sepanjang tahun. Ketersediaan beras medium dalam jumlah besar hanya terdapat di beberapa kabupaten tertentu yang produksinya justru banyak diserap oleh pedagang dari provinsi lain. Persaingan harga dengan pedagang swasta yang menawarkan harga di atas HPP menjadi tantangan tersendiri bagi BULOG dalam menyerap gabah/beras secara optimal. Ditambah lagi, masih banyak penggilingan padi di wilayah ini yang berskala kecil dengan keterbatasan modal dan kapasitas produksi.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Barat telah mengupayakan berbagai langkah strategis dan solusi implementatif. Di antaranya adalah optimalisasi pembelian beras untuk kebutuhan komersial dengan harga yang lebih fleksibel, pengadaan beras dari wilayah surplus nasional seperti Pulau Jawa, serta diversifikasi sumber penyerapan beras dari daerah luar Sumatera. Selain itu, penguatan kemitraan dengan penggilingan-penggilingan kecil terus dilakukan secara aktif, disertai dengan pendekatan sistem pembayaran tunai agar lebih kompetitif. BULOG juga melaksanakan pengolahan gabah secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas penggilingan internal yang tersedia. Tidak hanya itu, kerja sama dengan lembaga keuangan seperti BRI dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di sektor penggilingan padi dan

petani, melalui program-program permodalan mikro dan UMKM, sehingga diharapkan dapat memperkuat struktur pengadaan pangan nasional secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil magang dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran untuk mendukung optimalisasi manajemen pengadaan beras dan non-beras di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Barat, yaitu:

1. Perum BULOG diharapkan dapat semakin memperkuat dan memperluas jaringan kemitraan strategis dengan para pelaku utama di sektor pertanian, termasuk petani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta pengusaha penggilingan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif-insentif yang lebih kompetitif dan menarik, seperti pemberlakuan sistem pembayaran tunai, penetapan harga pembelian yang bersaing dan adil, serta pemberian fasilitas pembinaan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan minat mitra dalam menjalin kerja sama, tetapi juga memperkuat basis pengadaan domestik.
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara Perum BULOG dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, serta instansi terkait lainnya dalam melakukan pemetaan yang lebih akurat terhadap wilayah-wilayah dengan potensi surplus produksi pangan, khususnya beras medium. Dengan strategi ini, kegiatan pengadaan dapat difokuskan secara

lebih efisien pada daerah-daerah yang memang memiliki kapasitas produksi berlebih, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain di luar Sumatera Barat yang selama ini menjadi alternatif sumber pengadaan.

3. Perum BULOG juga disarankan untuk secara aktif memperluas cakupan dan peran program Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai saluran distribusi produk pangan ke masyarakat. Penguatan fungsi RPK akan mendorong pemerataan distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah yang jauh dari pusat kota, serta berkontribusi dalam menjaga keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen melalui pendekatan distribusi langsung.
4. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh rantai proses manajemen pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kontrak, penyimpanan, hingga distribusi produk pangan, perlu terus ditingkatkan. Transformasi digital ini sangat penting guna mendukung proses monitoring dan evaluasi yang lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap terwujudnya sistem ketahanan pangan yang modern dan berkelanjutan.
5. Terakhir, Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Barat diharapkan dapat terus mengembangkan berbagai bentuk inovasi, baik dalam strategi pengadaan maupun dalam sistem penyaluran pangan, yang adaptif terhadap dinamika pasar, perubahan kebijakan, dan kondisi produksi pertanian lokal. Inovasi ini penting untuk memastikan bahwa BULOG tetap mampu menjalankan peran utamanya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga

pangan pokok nasional, terlebih di tengah tantangan global dan regional yang semakin kompleks. Perum BULOG juga disarankan untuk memperluas peran program Rumah Pangan Kita (RPK) dalam menyalurkan produk pangan, sehingga distribusi produk menjadi lebih merata dan harga pangan di tingkat konsumen dapat lebih terkendali.

